

JOB DISCRIPTION

KK

TKA 45/03

Kus
s

TESIS

**STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN TATA USAHA
DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN ANALISIS JABATAN**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

RATNA KUSUMAWARDHANI

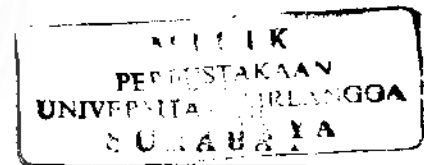
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN TATA USAHA
DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR DALAM
RANGKA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN ANALISIS JABATAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Airlangga Surabaya**

Oleh :



**RATNA KUSUMAWARDHANI
NIM. 099913526 M**

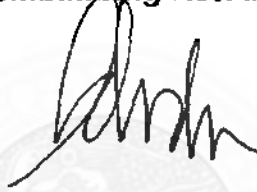
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
TGL. FEBRUARI 2002**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 MARET 2002

Oleh :

Pembimbing Ketua,



dr. Widodo J. Pudjirahardjo,MS.,MPH.,Dr.PH
Nip. 130 610 101

Pembimbing,



Dr. Nyoman Anita Damayanti,drq.,MS
Nip. 131 871 470

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan saya sampaikan kepada dua pembimbing yang saya kagumi, DR. Widodo J.P., MS., MPH., DR., PH., yang ditengah kesibukan padatnya masih berkenan membimbing, mengarahkan, membuka wawasan dan memberikan masukan untuk kesempurnaan penulisan ini serta DR. Nyoman Anita Damayanti, drg., MS yang begitu sabar, teliti, penuh perhatian selalu memotivasi dan mencari solusi dalam penulisan tesis ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kedua pembimbing saya dalam mengabdikan diri di dunia pendidikan.

Selanjutnya terima kasih saya sampaikan kepada DR. Bambang Giatno Rahardjo., MPH., DR. A. Ratgono., M. Kes., Dra. Siti Sulasmi., Psi., MSc dan Ratna Dwi Wulandari SKM., M. Kes yang telah memberikan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga, Prof. DR., H. Soedarto, DTM & H., Ph.D atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister. Terima kasih kepada Direktur

Pascasarjana Universitas Airlangga Prod. DR. dr. Muhammad Amin atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa program magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Kabag Tata Usaha, Kasubdin, Kasubag dan Kasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang telah mengizinkan, memberikan kesempatan dan berbagai bantuan kepada saya dalam melaksanakan penelitian di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Perkenankan secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada almarhum ayah saya tercinta Oetomo Moestijo beserta ibu saya tercinta Hj. Sri Hartati Oetomo, yang selalu mendorong putra-putrinya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saya tidak akan mungkin dapat membalas segala jasmu, mungkin sedikit prestasi saya ini akan membahagiakanmu, terima kasih atas doa restunya.

Terima kasih dan penghargaan kepada suami saya tercinta Dadya Indraksa yang banyak memberi wawasan dalam penyempurnaan tesis ini, terima kasih atas pengorbanan, bantuan dan doa, semoga kesuksesan juga akan menyertai mas. Terima kasih pada ananda tercinta Dea dan Odi atas segala pengorbanan dan senantiasa mendoakan untuk keberhasilan ibu, semoga apa yang ibu lakukan ini dapat memacumu dalam menuntut ilmu dan kesuksesan juga akan menyertai kalian.

Kepada seluruh teman-teman baik saya di Unair, UGM, Dinas Kesehatan Propinsi maupun Institusi kesehatan lainnya yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat dalam penyelesaian tesis ini, saya mengucapkan terima kasih dan semoga Allah membalas budi baik kalian.

Saya menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini, saya sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari berbagai pihak yang membaca tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Propinsi, khususnya bagi pengembangan manajemen Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahNya atas segala yang telah saya kerjakan, Amin.

Surabaya, Januari 2002

Penulis

ABSTRACT

This study is a model of thinking to establish the organization structure based on job analysis. The objective of the study is to establish the organization structure of administration division of East Java health services realization to decentralization policy based on job analysis approach.

Administration division is chosen as the object of study because of central government transferred the resources: personnel, budget, equipment and documentation to the local government. As the local government responsible for the resources, have many impact to main job, work volume and the authority of administration division in health organization.

The study design is qualitative analysis of the outcome of in depth interview and the questioner about the job had been done and the one that should be done by the administration division as a supporting staff in order to support the others divisions as a line staff.

The result of job analysis is a job description that consist of two parts : (1) 15 general job and (2) 84 technical job. The technical job consist of (a) 19 general administrative duties, having to do with protocol and internal services (b) 16 equipment administrative duties (c) 19 personnel administrative duties (d) 18 financial administrative duties (e) law and public relation administrative duties.

There are two alternative recommendation of the study with regard to organization structure. The first alternative is taken as recommendation of organization structure of administration division in East Java province health service by the consideration (1) the challenge of organization at present (2) the challenge of organization at the time of transition (3) the challenge of organization in the future.

Head of administrative division, should have some qualification as a job specification having administration scholar, grade IV/a, working skill mentally and socially. As the middle manager should have human skill and conceptual skill, and personal standard (1) the intelligence as well as the scholar (2) the steady ability leadership (3) the effective communication ability (4) the higher moral virtues (5) good judgment (6) full of initiative.

Keywords : Job analysis, job description, job specification, organization structure.

RINGKASAN

Otonomi daerah telah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001, dengan diberlakukannya Desentralisasi baik karena alasan politis, keadilan ataupun manajemen yang lebih baik pastilah ada implikasinya. Salah satunya adalah perubahan tatanan organisasi, dibidang kesehatan.

Penelitian ini sebagai model berfikir dalam penyusunan struktur organisasi berdasarkan kajian analisis jabatan. Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun struktur organisasi Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi dalam rangka otonomi daerah berdasarkan kajian analisis jabatan. Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dipilih sebagai sasaran penelitian, karena dalam rangka Otonomi Daerah diserahkan P3D (Pegawai, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi) dari pemerintah pusat kepada propinsi mempunyai dampak terhadap tugas pokok, volume pekerjaan dan kewenangan ketatausahaan di organisasi kesehatan.

Struktur organisasi Dinas kesehatan Propinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan kewenangan di bidang kesehatan sesuai dengan PP No. 25 tahun 2000. Sedangkan organisasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ditetapkan dengan Perda No. 37 tahun 2000. Dengan adanya struktur baru tersebut perlu dilakukan analisis jabatan, sehingga dihasilkan deskripsi jabatan bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam PP 25 tahun 2000 berdasarkan analisis jabatan, deskripsi jabatan tersebut sampai dengan akhir penulisan ini belum ada.

Rancangan penelitian ini adalah analisa kualitatif dari hasil *Indepth Interview* dan pengisian kuesioner mengenai tugas yang telah dilakukan dan seharusnya dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi dalam mendukung fungsi lini. Responden penelitian adalah seluruh pejabat struktural Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Setelah mengidentifikasi pendapat pejabat struktural pengguna Bagian Tata Usaha serta memperhatikan pendapat pejabat struktural di Bagian Tata Usaha maka tersusun deskripsi jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi yang dikelompokkan dan terdiri dari (1) 15 tugas umum (2) 84 tugas teknis yang terdiri dari (a) 19 tugas administrasi umum (b) 16 tugas administrasi perlengkapan (c) 19 tugas administrasi kepegawaian (d) 18 tugas administrasi keuangan (e) 12 tugas administrasi hukum dan hubungan masyarakat.

Hasil deskripsi jabatan tersebut dikelompokkan dalam tugas pokok fungsi yang sejenis, sehingga didapatkan dua alternatif struktur organisasi bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi yang berbeda dengan struktur organisasi yang ada saat ini. Alternatif 1 dalam melaksanakan tugasnya

Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 4 Sub bagian yaitu (1) sub bagian umum dan perlengkapan (2) sub bagian kepegawaian (3) sub bagian keuangan (4) sub bagian hukum dan humas. Alternatif 2, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 3 sub bagian yaitu (1) sub bagian umum, perlengkapan, Hukum dan Humas (2) sub bagian kepegawaian (3) sub bagian keuangan.

Alternatif 1 dipakai sebagai rekomendasi struktur organisasi Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi dalam Rangka Otonomi Daerah berdasarkan pertimbangan (1) tantangan organisasi masa kini (2) tantangan organisasi masa transisi (3) tantangan organisasi masa depan.

Spesifikasi jabatan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Sarjana Administrasi diutamakan yang mempunyai jenjang magister dan berpengalaman di bidang administrasi, golongan IVa, mempunyai ketrampilan kerja aspek mental yaitu kecakapan kerja fikiran seperti menganalisis data, menghitung dan membuat keputusan serta aspek sosial yaitu kecakapan dalam berhubungan dengan orang lain seperti mempengaruhi, menggerakkan, membentuk pendapat dan berpidato. Bakat kerja yang harus dimiliki yaitu G (*Intelligence*), V (*Verbal aptitude*) dan Q (*Clerical Perception*) sedangkan temperamennya kerja atau kemampuan kerja yang harus dimiliki oleh Kepala Bagian Tata Usaha yaitu (D (DCP : *Direction Control Planning*); F(FIF : *Feeling Idea Fact*); I(INFLU : *Influencing*); J(SJC : *Sensory Judgmental Criteria*); D (DEPL : *Dealing with people*), minat kerja yang harus dimiliki yaitu 1b (pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data), 5b (pilihan melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif) dan 3a (pilihan melakukan kegiatan rutin, konkrit dan teratur). Kepala Bagian Tata Usaha sebagai *Middle Management* harus mempunyai keahlian *Human Skill* dan *Conceptual Skill*, serta standar personil (1) taraf *intelegence* yang setingkat sarjana (2) *leadership ability* yang mantap (3) *communication ability* yang efektif (4) moral vitues yang tinggi (5) *good judgment* (6) kaya akan *initiative*.

Agar organisasi dapat berfungsi dengan baik harus didukung oleh tata laksana kerja yang mantap melalui berbagai pendekatan manajemen antara lain uraian tugas dan pembagian tugas yang jelas baik di jajaran struktural maupun staf, prosedur tetap dalam persyaratan kegiatan di setiap pelaksanaan tugas, tata hubungan kerja yang didukung oleh sistem komunikasi yang baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iiii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah Dan Perumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	15
1.4.1 Tujuan Umum	15
1.4.2 Tujuan Khusus	16
1.5 Manfaat Penelitian	16
1.5.1 Manfaat Bagi institusi	16
1.5.2 Manfaat Bagi Peneliti	17
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Analisis Jabatan	18
2.1.1 Prinsip-prinsip Analisis Jabatan	23
2.1.2 Tahapan Analisis Jabatan	24
2.2 Deskripsi Jabatan	32
2.3 Spesifikasi Jabatan	33

2.4	Struktur Organisasi	46
2.4.1	Beberapa Pandangan Dalam Penyusunan Organisasi	48
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN		
3.1	Kerangka Konseptual Penelitian	58
BAB 4. METODE PENELITIAN		
4.1	Rancangan Penelitian	62
4.2	Sasaran Penelitian	62
4.3	Populasi, Sampel dan Kriteria Sampel	62
4.3.1	Populasi	62
4.3.2	Sampel	63
4.3.3	Kriteria Sampel	63
4.4	Kerangka Operasional Penelitian	64
4.5	Variabel Penelitian	69
4.6	Definisi Operasional	69
4.6.1	Deskripsi Jabatan	69
4.6.2	Spesifikasi Jabatan	73
4.6.3	Pengelompokan Tugas Pokok Fungsi Yang Sejenis	73
4.7	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	73
4.8	Instrumen Penelitian	74
4.9	Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan data	74
4.10	Teknik Analisis Data	75
BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN		
5.1	Gambaran Umum Penelitian	76
5.1.1	Gambaran Umum Organisasi Penelitian	76
5.1.2	Gambaran Umum Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi	85
5.1.3	Jalannya Penelitian	90
5.1.4	Analisis Hasil FGD Mengenai Kewenangan PP 25 tahun 2000	92
5.1.5	Karakteristik Responden	94
5.2	Pendapat Responden Non Tata Usaha Mengenai Tugas Bagian Tata Usaha Yang Sudah Dilakukan Untuk Mendukung Aktivitas Subdinas Serta Tugas Bagian Tata Usaha Yang Seharusnya Mendukung Aktivitas Subdinas Namun Belum Dilakukan	96
5.2.1	Administrasi Umum	97
5.2.2	Keprotokolan dan Urusan Rumah Tangga	99

5.2.3	Pelayanan Perlengkapan Kantor	104
5.2.4	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	108
5.2.5	Administrasi Keuangan	119
5.2.6	Administrasi Hukum dan Tata Laksana	122
5.3	Hasil Kerja Bagian Tata Usaha Menurut Responden Non Tata Usaha	125
5.3.1	Hasil kerja Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Umum Menurut Responden Non Tata Usaha	125
5.3.2	Hasil Kerja Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Perlengkapan Menurut Responden Non Tata Usaha	127
5.3.3	Hasil Kerja Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Menurut Responden Non Tata Usaha	128
5.3.4	Hasil Kerja Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Keuangan Menurut Responden Non Tata Usaha	130
5.3.5	Hasil Kerja Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Hukum Menurut Responden Non Tata Usaha	132
5.4	Tanggung Jawab Bagian Tata Usaha Menurut Responden Non Tata Usaha	133
5.4.1	Pelayanan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Rumah Tangga	133
5.4.2	Pelayanan Administrasi Perlengkapan	134
5.4.3	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	134
5.4.4	Pelayanan Administrasi Keuangan	134
5.4.5	Pelayanan Advokasi Hukum Dan Kehumasan	135
5.5	Wewenang Bagian Tata Usaha Menurut Responden Non Tata Usaha	135
5.5.1	Wewenang Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Umum, Keprotokolan dan Rumah Tangga	136
5.5.2	Wewenang Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Perlengkapan	137
5.5.3	Wewenang Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian	137
5.5.4	Wewenang Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Keuangan	138
5.5.5	Wewenang Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Advokasi Hukum	138

5.6	Tugas Bagian Tata Usaha Menurut Responden Tata Usaha	139
5.6.1	Tugas Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Umum, keprotokolan, Rumah Tangga dan Perlengkapan	139
5.6.2	Tugas Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian	140
5.6.3	Tugas Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Keuangan	141
5.6.4	Tugas Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas	142
5.7	Tanggung Jawab Bagian Tata Usaha Menurut Responden Tata Usaha	142
5.7.1	Tanggung Jawab Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Umum, Keprotokolan, Rumah Tangga dan Perlengkapan	143
5.7.2	Tanggung Jawab Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian	143
5.7.3	Tanggung Jawab Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Keuangan	144
5.7.4	Tanggung Jawab Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas	144
5.8	Wewenang Bagian Tata Usaha Menurut Responden Tata Usaha	144
5.8.1	Wewenang Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Umum, Keprotokolan, Rumah Tangga dan Perlengkapan	145
5.8.2	Wewenang Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian	145
5.8.3	Wewenang Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Administrasi Keuangan	145
5.8.4	Wewenang Bagian Tata Usaha Dalam Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas	146
5.9	Spesifikasi Jabatan Pejabat Struktural Bagian Tata Usaha Menurut Responden Tata Usaha	146
5.10	Analisis Hasil FGD II (Rekomendasi Struktur Organisasi Bagian TU Dinkes Prop. Jatim)	148

BAB 6. PEMBAHASAN

6.1	Pembahasan Deskripsi Jabatan (Tugas, Tanggungjawab, Wewenang) Bagian Tata Usaha Dinas Kes. Prop.	150
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

6.2 Pembahasan Spesifikasi Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha	169
6.3 Struktur Organisasi Bagian Tata Usaha Berdasarkan Kajian Analisis Jabatan	177

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan	194
7.2 Saran	199
7.2.1. Saran bagi Institusi	199
7.2.2. Saran Untuk Peneliti Lain	200

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.	Distribusi Staf Dinas Kesehatan Propinsi Menurut Jenis Pendidikan, Oktober 2001	78
Tabel 5.2.	Distribusi Staf Dinas Kesehatan Propinsi Menurut Golongan, Oktober 2001	79
Tabel 5.3.	Distribusi Staf Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur pada Bagian dan Subdin Menurut Jenis Pendidikan, Oktober 2001	81
Tabel 5.4.	Distribusi Staf Dinas Kesehatan Propinsi pada Bagian dan Subdin menurut golongan PNS, Oktober 2001	83
Tabel 5.5.	Proporsi distribusi staf TU dan Non TU berdasarkan golongan, Oktober 2001	84
Tabel 5.6.	Proporsi Distribusi Staf Bagian TU dan Staf Subdin berdasarkan tingkat pendidikan, Oktober 2001	84
Tabel 5.7.	Distribusi Staf Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi di Subbag Umum dan Perlengkapan, Subbag Kepegawaian, Subbag Keuangan, Subbag Hukum dan Tata Laksana, Oktober 2001	88
Tabel 5.8.	Distribusi Staf Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi menurut Pendidikan di Subbag Umum dan Perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Tata Laksana, Oktober 2001	89
Tabel 5.9.	Distribusi responden berdasarkan eselon, tingkat pendidikan dan golongan, November 2001	95
Tabel 5.10.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan Bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan administrasi surat menyurat, Oktober 2001	97

Tabel 5.11.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan Bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan rapat/pertemuan, Oktober 2001	100
Tabel 5.12.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan tilpun, air listrik, Oktober 2001	101
Tabel 5.13.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan Bagian Tata Usaha dan seharusnya dilakukan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pengamanan lingkungan, kebersihan dan keindahan serta perparkiran, Oktober 2001	102
Tabel 5.14.	Pendapat responden non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilakukan Bagian Tata Usaha untuk dan seharusnya dilaksanakan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam hal kebutuhan pemeliharaan, perbaikan sarana kantor serta kebutuhan ATK, Oktober 2001	104
Tabel 5.15.	Pendapat responden non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelaksanaan waskat kekayaan negara, serta pendistribusian pengadaan barang, oktober 2001	107
Tabel 5.16.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan Bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan pendataan pegawai, Oktober 2001	109

Tabel 5.17.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan kartu-kartu pegawai, Oktober 2001	110
Tabel 5.17.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan kartu-kartu pegawai, Oktober 2001	111
Tabel 5.19.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan Bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pendayagunaan tenaga dokter PTT, drg. PTT dan bidan PTT, Oktober 2001	113
Tabel 5.20.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan Bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan pengembangan pegawai, Oktober 2001	116
Tabel 5.21.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan Bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam hal pembinaan pegawai, Oktober 2001	117
Tabel 5.22.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas yang sudah dilaksanakan Bagian Tata Usaha dan seharusnya dilaksanakan Bagian Tata Usaha untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan cuti dan ijin belajar bagi pegawai, Oktober 2001	118
Tabel 5.23.	Pendapat respon Non Tata Usaha mengenai Tugas Bagian Tata Usaha yang telah dilaksanakan dan seharusnya dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan administrasi keuangan, Oktober 2001	120

Tabel 5.24.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas Bagian Tata Usaha yang telah dilaksanakan dan seharusnya dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan administrasi anggaran rutin, Oktober 2001	121
Tabel 5.25.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas Bagian Tata Usaha yang telah dilaksanakan dan seharusnya dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan advokasi hukum, Oktober 2001 .	123
Tabel 5.26.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai tugas Bagian Tata Usaha yang telah dilaksanakan dan seharusnya dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Subdin dalam pelayanan kehumasan, Oktober 2001	124
Tabel 5.27.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai hasil kerja Bagian Tata Usaha dalam layanan administrasi umum, keprotokolan dan RT, Oktober 2001	126
Tabel. 5.28.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai hasil kerja dalam layanan administrasi perlengkapan, Oktober 2001	127
Tabel 5.29.	Pendapat responden Non Tata Usaha mengenai hasil kerja Bagian Tata Usaha dalam pelayanan administrasi kepegawaian, Oktober 2001	129
Tabel 5.30.	Pendapatan responden Non Tata Usaha mengenai hasil kerja Bagian Tata Usaha dalam pelayanan administrasi keuangan, Oktober 2001	131
Tabel 5.31.	Pendapatan responden Non Tata Usaha mengenai hasil kerja Bagian Tata Usaha berkaitan dengan pelayanan administrasi hukum, Oktober 2001	132
Tabel 6.1.	Deskripsi Jabatan (tugas, tanggung jawab, wewenang) Kepala Bagian Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi	160
Tabel 6.2.	Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dilihat dari alternatif jumlah subbag	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kanwil Depkes Prop. Jatim berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 tahun 1996 tentang organisasi dan tata kerja Kanwil Depkes	3
Gambar 2. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Daerah Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 20 tahun 1994 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Daerah Prop. Jawa Daerah Tingkat I Jawa Timur	5
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Sesuai Perda No. 37 Tahun 2000	8
Gambar 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum adanya deskripsi jabatan	14
Gambar 5. Langkah-langkah Penyelenggaraan Analisis Jabatan	31
Gambar 6. Kerangka Konseptual Penelitian	59
Gambar 7. Kerangka Operasional Penelitian	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambaran Penelitian.....	204
Lampiran 2. Bahan Kerja, Perangkat Kerja, Hasil Kerja Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Oktober 2001	205
Lampiran 3. Korelasi Jabatan Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan Unit Kerja Internal Maupun Eksternal	209
Lampiran 4. Kuesioner Analisis Jabatan Bagian Tata Usaha Bagi Pemegang Jabatan Struktural di Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi	211
Lampiran 5. Kuesioner Analisis Jabatan Untuk Pemegang Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur	216
Lampiran 6. Cek List Analisis Jabatan Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Propinsi Bagi Pejabat Struktural Non Bagian Tata Usaha	221
Lampiran 7. Undangan FGD I	236
Lampiran 8. Daftar Hadir FGD I	237
Lampiran 9. Laporan dan Rekaman FGD I	238
Lampiran 10. Undangan FGD II	243
Lampiran 11. Laporan dan Rekaman FGD II.....	244



BAB 1
PENDAHULUAN